

BAB III

KRONOLOGIS DIHAPUSNYA BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Kesenjangan yang muncul dari penataan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Jawa Tengah dengan Permendagri tentang Humas pemerintah, menjadi permasalahan penelitian serta memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut, sebagaimana akan disajikan dalam sub bab di bawah ini.

3.1 Gambaran Umum Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah narasumber yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informasi yang didapatkan dari narasumber adalah berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara melalui pendekatan *interview guide* secara *face to face*, mengenai permasalahan yang ingin disajikan dalam bentuk penjelasan.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah aparat pemerintah terkait, yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu;

1. Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang turut memiliki wewenang terkait penataan perangkat daerah di Jawa Tengah, sebagai informan I;
2. Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah

(Perda) Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada tahun 2016, sebagai informan II;

3. Ahmad Abadi, Kabag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pengoordinir dan penyusunkebijakan Daerah di bidang kelembagaan yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai informan III;
4. Sudaryanto, Mantan Kapala Biro Organisasi yang pernah bertugas mengkoordinir dan menyusun kebijakan daerah terkait penataan kelembagaan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada tahun 2016 , sebagai informan IV;
5. Sinung N Rachmadi, Mantan Kepala Biro Humas Provinsi Jawa Tengah merupakan pengkoordinir tugas perangkat daerah di bidang Hubungan Maryarakat yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai informan V;
6. Lilik Henry Ristanto, Kepala Bagian Humas dan Protokol Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai pengkoordinir bidang hubungan masyarakat dan protocol pimpinan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah; selaku informan VI;
7. Dadang Somantri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Jawa Tengah, selaku informan VII.

3.2 Penyajian Data

Data penelitian bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang menggunakan *interview guide*. Selanjutnya untuk menajamkan analisis data, diperkuat dengan kajian tentang Undang-undang terkait, regulasi lainnya yang mendukung.

3.2.1 Kinerja Biro Humas Jawa Tengah dari *Tape Recorder* hingga Pembantu Gubernur

Berikut persepsi narasumber/informan mengenai kinerja Biro Humas dilihat dari kesan *stakeholder* terhadap keramahan Biro Humas dalam membantu dan menghargai *stakeholder*.

1) Humas Seperti *Tape Recorder*;

Sebagaimana dikatakan oleh informan I yakni Gubernur Jawa Tengah bahwa:

humas selama ini merupakan replikasi dari pembicaraan saya saja, sehingga saya mempersepsikan bahwa peran Humas seperti tape recorder saja.

Dari *statement* informan I di atas, dapat dimaknai bahwa peran humas dalam suatu organisasi diibaratkan layaknya *tape recorder* saja, sehingga hanya dapat berbicara satu arah saja, tanpa bisa memberikan umpan balik atau menerima umpan balik dari khalayak sebagai pendengarnya. Disatu sisi, peran Humas selama ini lebih banyak menjadi semacam protokoler dari seorang Gubernur, baik tentang aspek; acara apa, di mana, kapan, mengapa serta aktivitas apa saja yang sedang dilakukan seorang Gubernur. Humas selama ini juga kurang banyak

berperan menjadi agen sosial, politik, budaya, pariwisata dan hukum dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga *image* dari provinsi Jawa Tengah jarang sekali di-*branding* secara proporsional dan secara profesional. Dalam hal ini peran Humas lebih banyak menjadi corong dari seorang Gubernur daripada sebagai garda depan informasi seputar Jawa Tengah. Hal ini yang tidak dikehendaki oleh informan I selaku Gubernur Jawa Tengah.

2) Humas sebagai Pintu dan Corong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Hal tersebut dibenarkan oleh informan II yakni Ketua Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada tahun 2016 yang berkomentar bahwa:

pemerintah provinsi jawa tengah harus dikomunikasikan melalui humas sebagai pintunya. Saat ini sebetulnya lembaga seperti humas dibutuhkan untuk mendukung performa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti corong yang dapat mengkomunikasikan pemerintah secara aktif

Pernyataan dari informan II di atas terkesan lebih proporsional, karena dirinya mempersepsi peran humas di samping sebagai corong suatu organisasi (*tape recorder*, dalam istilah informan I), namun juga secara aktif mampu berperan dalam merepresentasikan bagaimana profil dan aktivitas dari suatu organisasi yang menaunginya. Di sini peran humas bukan saja menjadi protokoler Gubernur, namun lebih berperan sebagai agen atau garda depan mengenai informasi seputar Jawa Tengah, yang sekaligus mengelola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar mengenai profil Jawa Tengah ke hadapan publik. Mensosialisasikan

kebijakan-kebijakan, program, perencanaan hingga pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Humas sebagai *Supporting* Pimpinan;

Pernyataan informan I dan informan II sejalan dengan komentar dari informan III yang bertugas sebagai pengoordinir dan penyusunkebijakan Daerah di bidang kelembagaan yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa:

humas sebenarnya memiliki banyak peran yang sifatnya supporting kepada pimpinan seperti gubernur.

Pendapat informan III dan informan II hampir sejalan bahwasanya peran humas dalam suatu organisasi sangat *supporting* atas kegiatan seremoni atau aktivitas kerja dari seorang Gubernur, sehingga dari peran tersebut terlihat bahwa kehadiran humas dalam suatu organisasi mutlak diperlukan, sebagai sarana komunikasi dua arah, baik dalam lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi.

4) Humas Selaku Pembantu Gubernur dalam Bidang Kehumasan;

Informan IV yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi pada tahun 2016 menambahkan pula bahwa:

salah satu fungsi dari biro Humas adalah selaku pembantu Gubernur di bidang Kehumasan.

Pandangan informan IV di atas lebih populis dan sesuai dengan perkembangan kehumasan yang kekinian, bahwa segala aktivitas Gubernur seyogyanya diinformasikan kepada segenap jajaran juga kepada warga masyarakat, sehingga semua pihak menjadi lebih

mengetahui dan memahami aktivitas dan program kerja yang sedang dan akan dilakukannya. Penyebaran informasi tersebut oleh kehumasan merupakan suatu kewajiban, sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, di mana salah satunya adalah keberadaan keterbukaan publik oleh badan publik, semacam Pemerintah Daerah, SKPD, BUMN dan lain sebagainya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.

5) Kinerja Humas Belum Maksimal

Penjelasan lebih mendetail mengenai persepsi atas kinerja Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum penataan struktur dipaparkan oleh Informan V yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

kinerja Humas sebelum SOTK masih belum maksimal

Kurang maksimalnya kinerja Humas Provinsi Jawa Tengah pada masa itu adalah dikarenakan Fungsi Humas saat itu masih rancu, apakah humas pemimpin daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah) atau humas pemerintah daerah yang membentuk *brand image* bagi pemerintahan atau capaian-capaian program dan prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu limitasi sumber daya manusia dan anggaran

sehingga humas tidak dapat melakukan ekspansi, inovasi, maupun kreasi publikasi kehumasan yang kekinian.

Menengahi saling sengkabut tentang persepsi stakeholder terhadap peran Humas, pandangan informan V lebih bisa dijadikan penengah, yang pada intinya bahwa selama ini peran humas Provinsi belum optimal dari apa yang seharusnya dicapai, di samping masih terjadinya saling tumpang tindih peran kehumasan pada masing-masing SKPD dengan Humas Provinsi sehingga fungsi menginformasikannya menjadi rancu, dan dapat dikatakan saling “*iren*”, karena semua SKPD senantiasa *njagakne* keberadaan humas Provinsi. Dalam pandangan informan V, humas seharusnya berada pada masing-masing SKPD dengan peran dan fungsi memberitahukan dan menginformasikan segala aktivitas dan program kerja dari SKPD yang bersangkutan, dan berada di luar Humas Provinsi yang berperan dan berfungsi sebagai corong dari Gubernur selaku pemangku wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga segenap aktivitas dan program kerja dari Gubernur menjadi tanggung jawab Humas Provinsi.

Informan V juga menambahkan bahwa di tengah keterbatasan peran Humas selama ini, di pihak lain Humas masih diperlukan, hanya saja peran Humas lebih ditingkatkan, khususnya daya kreasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Informan V mencontohkan semisal dengan menggunakan media sosial, karena sebelum ini peran Humas di Provinsi terlanjur berorientasi pada media

mainstream (televisi dan surat kabar), dalam hal ini humas di masa mendatang harus berekspansi ke media sosial. Terlebih lagi di era digital saat ini, setiap ASN bisa dipastikan mempunyai android, sebagai media sosial yang populer, hingga menjangkau warga masyarakat di pelosok pedesaan. Dalam hal ini, informan V mengatakan sebagai berikut:

Keterbatasan sumber daya manusia, dianggap melatarbelakangi peran public relations yang rancu dan suram.

Kendala-kendala dalam aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial dinilai menjadi rintangan humas dalam rangka mengoptimalkan perannya di tengah iklim keterbukaan informasi yang diwarnai dengan sikap kritis warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Tanpa adanya dukungan Humas secara positif terhadap institusi atau badan publik, dikhawatirkan badan publik akan menjadi bulan-bulanan warga masyarakat dengan macam-macam cacian dan bully-an, sehingga berpotensi merongrong kewibawaan dan kredibilitas pemerintah di mata publik.

Dari uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa peran humas sekecil apa pun, tetap diperlukan bukan dengan dibubarkan, justru ke depan peran humas dioptimalkan dan salah satu langkahnya ialah dengan melakukan pengembangan daya kreasi para pengelola *public relations* untuk mampu memanfaatkan media yang ada saat ini untuk mendukung aktivitas dan program kerja dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai upaya *benchmarking* profil seorang Gubernur agar semakin populer di semua kalangan masyarakat di Jawa Tengah.

Dengan demikian, dalam hal ini yang pokok adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang berkecimpung di kehumasan, agar bagaimana mampu berkiprah positif bagi kemajuan dan perkembangan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, informan V menambahkan bahwa:

Selama saya memimpin, saya mengatakan waktu saya memimpin di saat itu sedang merintis, membuka tabir secara interaktif dengan publik

Dengan demikian apa yang dirasakan saat ini adalah humas sudah berperan, namun dalam eskalasi yang kurang optimal, karena minimnya kreasi dan inovasi dimensi kehumasan Provinsi Jawa Tengah, sebagai akibat kurang mumpuninya petugas humas yang bekerja.

6) Humas Jadul

Bahkan informan V menggambarkan bahwa kinerja kehumasan Provinsi saat sangat jadul, jauh tertinggal di antara sesama mitranya di media online, media televisi, media radio dan media surat kabar. Dengan demikian langkah yang diperlukan adalah melakukan penataan ke dalam, agar sumber daya humas dapat lebih optimal dan progresif dalam menjalankan tugas kehumasannya. Sebagaimana keterangan informan V sebagai berikut:

Dahulu Humas jadul sekali

Penjelasan Informan V sebagai mantan Kepala Biro Humas tersebut menunjukan fakta bahwa Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada saat itu masih jadul belum mengikuti perkembangan *public*

relation yang modern, belum ada kreasi dan inovasi ataupun reformasi humas pemerintah yang kekinian. Sumber daya manusianya masih berorientasi pada administratif pegawai seperti menyusun Surat Pertanggung Jawaban.

Hal tersebut di atas didukung dengan berita mengenai Humas Jawa Tengah pada tahun 2013 yang menyebutkan bahwa, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyebut Biro Humas Setda Pemprov Jawa Tengah masih terkesan kuno. Lantaran, produk yang dihasilkan dinilai masih belum mengikuti perkembangan tren saat ini. (Tribunews, 2016)

7) **Humas Seperti Juru Penerang**

Di tengah era keterbukaan yang makin luas di negara ini, arti penting humas justru semakin dibutuhkan, karena hal ini sejalan dengan prinsip *clean and good government* yang digaungkan di negara demokrasi, sehingga bukan berperan sekedar corong dari *stakeholder* saja. Dalam hal ini informan I yakni Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa:

humas itu juru penerang, seperti lampu yang bersinar, seperti penerang, jadi kalau orang yang tidak tahu menjadi tahu, maka fungsinya besar, bahkan saya sudah meminta seluruh OPD harus punya humas.

Humas di era modern bukan hanya sebagai corong kepentingan dari pemerintah, namun lebih lanjut, Humas, merupakan kepanjangan dari pemerintah dalam rangka pendekatan kepada segenap masyarakat, dan sekaligus berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pihak pemerintah. Oleh karena pembangunan yang

selama ini dilakukan berlangsung di semua sektor, maka cukup beralasan pula ketika setiap badan atau biro pemerintah atau yang menurut informan I dinamakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki humas tersendiri dalam rangka pendistribusian informasi secara lebih massif dan kompeten.

Dalam nada positif, informan I menambahkan bahwa peran Humas setidaknya menjadi juru penerang, warga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham, ibarat suluh yang mampu menerangi pengetahuan warga tentang segala seluk-beluk provinsi Jawa Tengah, baik dari sisi aktivitas, program kerja, visi misi atau bahkan profil dari pejabat publik Jawa Tengah. Dalam hal ini, informan II menambahkan bahwa di tengah era keterbukaan seperti sekarang ini, justru peran humas harus semakin ditingkatkan, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi yang menghendaki partisipasi warga masyarakat seoptimal mungkin. Warga masyarakat dalam konstelasi demokrasi, bukan dianggap sebagai obyek pembangunan lagi, namun sudah ditempatkan sebagai subyek pembangunan, sehingga antara pemerintah dan warga masyarakat harus saling ditautkan dalam bentuk komunikasi dua arah, melalui kehumasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8) Humas Hanya Fokus Pada Aktivitas Gubernur

Menurut informan III yang turut terjun langsung dalam penyusunan kebijakan penataan struktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, arti

penting humas selama ini adalah:

setelah dianalisis ternyata biro humas lebih terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh gubernur, sementara eksplorasi terkait dinas-dinas melaksanakan apa dan telah berhasil apa itu kurang dieksplorasi untuk disampaikan ke masyarakat, itu kelemahannya.

Keterangan informan III tersebut menunjukkan reputasi Biro Humas yang lemah, karena belum bisa menjangkau capaian-capaian pemerintah daerah melalui Satuan Organisasinya seperti Badan dan Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sebagaimana keterangan informan III bahwa:

Pimpinan dalam hal ini pak gubernur selalu mengeluh, mengapa program-program yang sudah banyak dibuat, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat, kita sudah menghasilkan banyak program tetapi masyarakat tidak mengerti dan tahu.

Di sini terlihat bahwa kerja Humas dirasa belum optimal, walaupun kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memiliki akun di media sosial, namun distribusi informasi ke publik mengenai berbagai macam program pemerintah belum atau kurang disimak oleh warga masyarakat.

9) Kontribusi Yang Kurang Optimal Hingga Kurang Inisiatif Dan Proaktif

Sebagai sebuah institusi pemerintah daerah, Biro Humas Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat diandalkan, hal ini apabila dilihat dari ekspektasi yang belum tercapai oleh Biro Humas sesuai keterangan Informan I sebagai Kepala Daerah :

kontribusinya memberitakan dalam teori open government, sebenarnya bukan menunggu ditanya tapi kita lebih berinisiatif dan

proaktif untuk menyampaikannya, maka kalau anda melihat era milenial dan digital, semua saya wajibkan memiliki akun medsos, saya wajibkan, mungkin satu-satunya di Indonesia dan di Jawa Tengah

Pada dasarnya Kepala Daerah berharap pada Biro Humas agar lebih memberikan kontribusi yang inisiatif dan proaktif dalam menyampaikan capaian-capaian Pemerintah Daerah baik melalui akun media sosial yang dimiliki oleh Biro Humas.

10) Biro Humas Boros Struktur dan Beban Anggaran

Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mengakibatkan tereliminasi Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, selain karena hasil evaluasi kinerja yang buruk ditambah boros struktur dan beban anggaran. Hal tersebut dijelaskan oleh Informan V yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

terlalu boros, baik dari sisi struktur, sebenarnya sebagai sebuah biro dia layak untuk dibirokan, hanya saja strukturnya boros, seharusnya cukup 2 bagian

Sejalan dengan penjelasan Informan V, Informan III yang berperan sebagai koordinator penataan kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambahkan bahwa :

Dulu humas kita kegemukan, sehingga cara kerjanya masih cara kerja manual

Struktur Biro Humas yang *kegemukan* dan *boros* menjadi salah satu pertimbangan tereliminasi Biro Humas Setda Provinsi Jawa

Tengah saat penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di Jawa Tengah. Selain itu beban anggaran juga menjadi pertimbangan, hal ini dijelaskan oleh Informan V selaku mantan Kepala Biro Humas sebagai berikut :

perampangan SOTK itu sebenarnya lebih pada beban anggaran. membawa konsekuensi terhadap penganggaran, jika tetap ada strukturnya, maka harus ada pembiayaan terhadap tunjangan jabatan

Beban anggaran yakni pada pembiayaan terhadap tunjangan jabatan Biro Humas menjadi salah satu pokok alasan tereliminasinya Humas di Jawa Tengah. Seperti salah satu tunjangan yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pergub tersebut diatur pegawai yang mendapatkan atau tidak mendapatkan TPP. Ketentuan lain TPP diberikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 13 kali. Bagi SKPD/UPTD tertentu dengan beban kerja /tempat bertugas/kondisi kerja khusus dapat diberikan TPP tambahan. TPP tersebut memiliki nilai nominal paling rendah Rp. 3.000.000,- . Benar adanya apabila boros anggaran pada pembiayaan tunjangan jabatan menjadi salah satu pertimbangan pengeliminasian suatu organisasi pemerintahan.

Selain pembiayaan tunjangan, fokus rencana strategis penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 paling utama adalah Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

berdimensi kewilayahan sesuai dengan arahan kebijakan belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa bidang kehumasan bukan menjadi fungsi strategis dalam pelaksanaan pemerintahan di Jawa Tengah. Lain halnya dengan arah kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2016 yang paling utama adalah melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan. Kebijakan tersebut juga semakin mengiyakan bahwa bidang kehumasan bukan menjadi prioritas penganggaran baik pada skala regional pemerintah daerah dan skala nasional atau pemerintah pusat.

11) Sumber Daya Manusia yang Belum Kompeten

Sumber daya manusia yang ada di Biro Humas belum kompeten menjadi *public relations* yang ideal bagi Informan I selaku Kepala Daerah, hal ini disampaikan secara tersirat saat wawancara berikut ini :

Iya, itu bahasa yang paling bagus bahwa Humas belum kompeten menjadi Humas yang ideal

Hal tersebut bahasa paling bagus saat penulis menanyakan mengenai sumber daya manusia Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah yang belum kompeten dalam bidang kehumasan. Hal tersebut bahkan mempengaruhi *performance* kelembagaan Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah seperti yang dipaparkan oleh Informan II yakni Ketua Panitia Khusus Penyusunan Perda Penataan Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Hapus saja, karena jadul, dan hal ini bukan menyerang personal, artinya kita tidak menyerang kepala bironya, kabagnya dan lain-lain, tetapi karena performance kelembagaan

Performance yang menurun sebab sumber daya manusia yang belum berkompeten berakibat pada reputasi Biro Humas sebagai lembaga kehumasan daerah yang jadul kurang inisiatif dan proaktif dalam menyampaikan dan mensosialisasikan capaian, program, perencanaan hingga pelaksanaan masing-masing satuan organisasi perangkat daerah yang ada di Jawa Tengah.

3.2.2 Penetapan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah sebagai Penyebab Dihapusnya Biro Humas

Kondisi penyebab terjadinya pengambilalihan Biro Humas Setda Jateng sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah lama diwacanakan, demi mendukung terciptanya independensi, transparansi dan kompetensi informasi yang terkait dengan humas, bahwa humas berfungsi sebagai corong pemerintah daerah atau corong dari gubernur. Dua aspek yang melekat pada Gubernur, namun terkait dengan kuantitas dan kualitas komunikasi dan informasi bisa bermakna bias, karena Gubernur memiliki 2 (dua) kepribadian, yaitu selaku; pribadi dan selaku pejabat negara, sehingga keberfungsian dari distribusi informasi terkait aktivitas seorang Gubernur pun mesti dibatasi. Wacana dan pemikiran semacam itulah yang melatarbelakangi munculnya regulasi baru, agar peran Humas Provinsi menjadi lebih efisien dan efektif dengan pendanaan yang lebih ringan.

Selanjutnya lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk menjawab persoalan duplikasi atau bias fungsi humas provinsi selama ini. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membahas mengenai pembentukan perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas. Tahapan penerapan Peraturan Daerah yang mengakibatkan dihapusannya Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 871/4003/OTDA perihal Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa :

Memenuhi amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka percepatan penyelesaian peraturan pemerintah didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penentuan beban kerja perangkat daerah

Berdasarkan kutipan surat di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwajibkan melakukan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah sebelum merancang peraturan daerah tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang dilakukan dengan menggunakan system informasi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya akan diberikan hasil

rekomendasi sebagai tindaklanjut proses penyusunan Raperda selanjutnya.

- b. Hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a) Urusan Sekretariat Daerah

Hasil formulir validasi kesesuaian data dalam system informasi pemetaan urusan pemerintahan dengan data dukung pemerintahan daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan total skor sebesar 1.000 yang telah disahkan pada Juni 2016. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan skor tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tipe A yakni dengan mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar, dapat membentuk paling banyak 3 asisten dan 12 bagian / biro. Maka dengan kondisi saat itu yang memiliki 14 biro, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyederhanakan jumlah bironya.

Simplifikasi dan penyederhanaan jumlah biro yang ada di Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, hal tersebut diamini oleh pendapat

Informan II yang bertugas sebagai Ketua Pansus Penyusunan Perda SOTK di Jawa Tengah sebagai berikut :

biro-biro ini harus di simplifikasi dan disederhanakan jumlahnya dari 14 biro kemudian mengerucut menjadi 8 biro. Dengan catatan pada rapat pansus terakhir adalah soal biro humas akan dikonsultasikan oleh para asisten sekda, yang kemudian akhirnya hasil konsultasi dengan gubernur biro humas memang dihilangkan, dilebur dengan diskominfo dan di biro umum

Penjelasan Informan II tersebut didukung dengan paparan Informan III yang bertugas menertibkan kelembagaan Pemerintah Daerah Jawa Tengah pada Kegiatan Bakohumas Tahun 2016 memaparkan bahwa :

Hasil pembahasan pansus pasca konsultasi dengan Kemendagri menjadi 8 (delapan) Biro yang ada di Setda Provinsi Jawa Tengah, tanpa adanya Biro Humas pada hasil konsultasi tersebut.

Ditambah lagi pada Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan hasil Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan *Center Policy and Management Studies* (Reforma UGM) Tahun 2015 menjelaskan beberapa alternatif kelembagaan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang semakin ramping yakni mengeliminasi beberapa biro yang pada alternatif ideal mengubah menjadi 8 biro dengan perubahan nomenklatur atau penamaan dinas muncul Dinas Komunikasi dan Informatika.

Gambar 3.1
Pemetaan dan Proyeksi Kelembagaan Berdasarkan Naskah Akademik

Tabel 4. Pemetaan dan Proyeksi Kelembagaan

Alternatif 1 (Maksimal)	Alternatif 2 (Ideal)	Alternatif 3 (Minimal)
9 Biro: <u>Perbedaan nomenklatur dan perumpunan:</u> 1. Perekonomian dipisah dengan SDA)	8 Biro	8 Biro
29 Dinas <u>Perbedaan nomenklatur dan perumpunan:</u> 1. PU dan Penataan Ruang 2. Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan 3. Komunikasi, Informatika dan Sandi	28 Dinas <u>Perbedaan nomenklatur dan perumpunan:</u> 1. PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	27 Dinas <u>Perbedaan nomenklatur dan perumpunan:</u> 1. PU, Penataan Ruang dan Pertanahan 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
6 Badan: 1. Bappeda 2. BKD 3. Badan Diklat Pegawai 4. BPPKAD 5. Badan Litbang 6. Kantor Penghubung	6 Badan: 1. Bappeda 2. BKD 3. Badan Diklat Pegawai 4. BPPKAD 5. Badan Litbang 6. Kantor Penghubung	6 Badan: 1. Bappeda 2. BKD 3. Badan Diklat Pegawai 4. BPPKAD 5. Badan Litbang 6. Kantor Penghubung
Efektivitas dan Efisiensi Pejabat Struktural: - 80	Efektivitas dan Efisiensi Pejabat Struktural: - 98	Efektivitas dan Efisiensi Pejabat Struktural: - 127

Sumber : Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

b) Urusan Komunikasi dan Informatika

Hasil formulir validasi kesesuaian data dalam system informasi pemetaan urusan pemerintahan dengan data dukung pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika mendapatkan total skor sebesar 878 yang telah disahkan pada Juni 2016. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan skor tersebut urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika

tergolong pada tipe A yakni dengan mewadahi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar, yang artinya memiliki harapan untuk berdiri sendiri menjadi Dinas dengan rincian maksimal 1 sekretariat dengan 3 subbagian, 4 bidang dengan masing-masing maksimal 3 subbagian.

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 Pemetaan dan Proyeksi Kelembagaan Berdasarkan Naskah Akademik, pada setiap alternatif kelembagaan yang direkomendasikan pada Naskah Akademik tersebut, urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika muncul pada setiap alternatif kelembagaan yang disarankan berupa dinas dengan nomenklatur atau penamaan baru yang sudah disesuaikan dengan beban kerjanya.

Alasan tereliminasinya Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah yang terakhir adalah adanya urusan komunikasi dan informatika yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, hal tersebut disampaikan oleh Informan III yang bertugas sebagai Koordinator Penataan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah berikut ini :

amanah dari PP no.18 2016 menyebutkan terdapat 32 urusan pemerintahan daerah pada urusan tersebut tidak ada urusan kehumasan, tapi itu kehumasan masuk pada urusan komunikasi dan informatika

Adanya urusan komunikasi dan informatika yang didalamnya terdapat urusan kehumasan menyebabkan Biro Humas harus mengalah dan dirampingkan. Selain itu juga dikhawatirkan ada duplikasi fungsi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika jika humas tetap menjadi biro, sebagaimana ditambahkan oleh Informan III :

ada kominfo yang harus masuk sebagai independent, sebenarnya fungsi ini dapat dirampingkan tetapi dikhawatirkan akan terjadi duplikasi dengan dinas komunikasi dan informatika

c) Urusan Humas

Pemetaan urusan pemerintahan pada Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah di urusan pemerintahan Kehumasan pengukurannya menempel dengan urusan Sekretariat Daerah seperti pada penjelasan sebelumnya, hal ini terjadi karena system informasi pemetaan urusan pemerintahan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang didalamnya tidak mengatur urusan kehumasan.

2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

Dalam hal ini informan I sebagai Pemimpin Daerah mengatakan bahwa:

Ukuran dan besaran pegawai serta beban kerja sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah hanya mengikuti, dan akhirnya humas tidak berdiri sendiri sekarang justru diturunkan dan melekat pada Gubernur

Dari keterangan di atas dapat dimaknai bahwa perubahan birokrasi yang terjadi di jajaran Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang menyangkut Biro Humas Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di tingkat Nasional. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang terpilih pada pemilihan Gubernur Jateng Tanggal 26 Mei 2013 yang lalu, semangat perubahan dirumuskan dalam agenda reformasi birokrasi. Kebijakan tersebut diambil dengan sederet langkah strategis seperti, lelang terbuka Sekretaris Daerah, lelang jabatan eselon II, dan pengalokasian anggaran disesuaikan dengan agenda tahunan Gubernur. Agenda Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga diimplementasikan dalam Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Penataan ini di samping sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, juga dimaksudkan sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien serta meningkatkan pelayanan publik

sebagaimana tertuang dalam Visi-Misi Gubernur Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko.

Hal tersebut juga disetujui oleh Informan II sebagai salah satu Tim Legislatif yang menyusun Peraturan Daerah terkait penataan struktur Pemerintah Daerah Jawa Tengah menjelaskan sebagai berikut :

tindak lanjut dari perubahan sistem aturan perundang-undangan, yang kemudian ada peraturan pemerintah nomer 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, yang mengamanatkan untuk segera melakukan pembentukan baru perangkat daerah dengan prinsip dasar rightsizing tepat ukuran. Kalau dulu miskin struktur dan kaya fungsi

Bahkan Informan III sebagai koordinator penataan struktur organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah lebih jelas menyampaikan bahwa :

amanah dari PP no.18 2016, terdapat 32 urusan pemerintahan daerah dan tidak ada urusan kehumasan, tetapi kehumasan masuk kedalam urusan komunikasi dan informatika

Paparan Informan II dan Informan III tersebut menjelaskan bahwa penataan struktur organisasi pemerintah daerah yang berimbas pada dihapuskannya Biro Humas merupakan bagian dari implementasi UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 18/2016 diharapkan pelayanan terhadap masyarakat jauh lebih baik, cepat, efektif, dan tentu secara tidak langsung kalau lebih ringkas sehingga biaya-biaya tidak terlalu tinggi. Karena biaya yang selama ini banyak digunakan pada lembaga yang digabung dapat dibelanjakan lagi untuk kepentingan masyarakat. (Birohumas, 2016)

Berdasarkan materi Penatan Perangkat Daerah Fungsi Kehumasan sesuai dengan PP.18 Tahun 2016 yang dipaparkan oleh Informan III selaku koordinator yang turut serta pada penyusunan Raperda dalam Kegiatan Bakohumas yang diselenggarakan di Surakarta bulan September 2016 menjelaskan Proses Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- 1) Tahapan Rancangan Peraturan Daerah Perangkat Daerah telah dikirim ke DPRD 21 Juli 2016; Badan Pembentukan Peraturan Daerah merekomendasi kepada Pimpinan DPRD untuk di susun Perda tanggal 29 Juli 2016 setelah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal yang sama dengan agenda Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penjelasan Gubernur pada rapat tersebut disimpulkan berdasarkan berita “Jateng Segera Sesuaikan SOTK” pada *website* jatengprov.go.id yakni

Penyesuaian SOTK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas. Pertimbangan itu sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah

Uraian di atas menjelaskan faktor yang memertimbangkan dilaksanakannya penyesuaian SOTK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya keuangan (anggaran), jumlah

penduduk, keuangan daerah, serta besaran beban tugas. Faktor-faktor tersebut juga merupakan bagian dari variable pertimbangan pada system informasi pemetaan kelembagaan yang telah dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri di tahun sebelumnya.

Sedangkan hasil rekomendasi dari rapat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah :

- d) Pembahasan Rencana Peraturan Daerah tersebut harus mendasarkan pada tahapan dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah;
 - e) Proporsionalitas penggabungan urusan dengan mendasarkan pada rumpun dan kesetaraan tugas/kewenangan serta scoring (hasil pemetaan kelembagaan)
 - f) Jangan memaksakan penggabungan urusan dengan dasar efisiensi, tetapi tugas/kewenangan tidak setara;
 - g) Memerhatikan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan;
 - h) Rencana peraturan daerah tersebut mendesak maka pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus.
- 2) Sidang Paripurna DPRD tanggal 1 Agustus 2016 Penyampaian Pokok Pokok Rancangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

dilanjutkan Pembentukan Pansus DPRD yang akhirnya Panitia Khusus tersebut diketuai oleh Informan II;

- 3) Pansus melakukan Rapat pada tanggal 3 Agustus 2016 mengundang Esekutif dan Penyusun Naskah Akademis untuk mengetahui hasil evaluasi jabatan, hasil pemetaan urusan dan Pengalihan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang difasilitasi oleh Kemendagri;
- 4) Pansus Telah melaksanakan konsultasi ke Ditjen Otda Kemendagri pada tanggal 10 Agustus 2016. Hasil konsultasi tersebut berupa surat Menteri Dalam Negeri nomor : 188/3775/SJ tanggal 11 Oktober 2016 perihal Pedoman Persetujuan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang menekankan pada :

Tipe perangkat daerah yang akan ditetapkan tidak boleh lebih besar dari skor yang diperoleh dari hasil pemetaan, dan diharapkan kepala daerah dapat menurunkan tipe perangkat daerah lebih rendah dari hasil pemetaan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan.

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menghimbau bahwa Kepala Daerah diharapkan dapat menurunkan tipe perangkat daerahnya lebih rendah dari hasil pemetaan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan masing-masing daerah. Secara tidak langsung pertimbangan penganggaran dan pendapatan daerah menjadi dasar utama dari penataan SOTK ini.

- 5) Akhir Agustus sesuai rencana Rancangan Peraturan Daerah disetujui oleh DPRD Prov. Jateng dan diajukan ke Kemendagri untuk di evaluasi, namun baru tanggal 16 September 2016 disahkan di sidang paripurna DPRD. Pada selang waktu tersebut pernah dilaksanakan Dialog Interaktif Program “Gayeng bersama Gubernur Jateng” yang salah satu agenda pembahasannya adalah mengenai Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, berikut kutipan Informan III selaku Ketua Pansus Raperda SOTK dalam berita “Raperda SOTK Prov. Jateng : Ramping Tapi Tak Minimalis” pada *website* kesbangpoljateng.com sebagai berikut :

Sedangkan Biro Humas seharusnya tetap ada sebagai corong gubernur. Sehingga ketika Humas dihilangkan maka bagaimana gubernur sebagai orang nomor satu di Jateng dapat menyampaikan sekaligus menyosialisasikan gagasan maupun kinerjanya kepada masyarakat. Karenanya perlu beberapa skenario, tetap menjadi biro atau salah satu bagian dari biro lain.

Pada dasarnya hal tersebut sudah menjadi sinyal eksistensi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara institusional. Disisi lain saat peneliti mewawancarai Informan II sempat menjelaskan saat pelaksanaan dialog tersebut yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah yang saat itu memiliki wewenang terhadap keputusan penyusunan kelembagaan diintern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa :

Hapus saja, karena jadul, dan kita bukan menyerang personal, artinya kita tidak menyerang kepala bironya, atau kebagnya, tetapi memang performance kelembagaan

Performance yang menurun sebab sumber daya manusia yang belum berkompeten berakibat pada reputasi Biro Humas sebagai lembaga kehumasan daerah yang jadul kurang inisiatif dan proaktif dalam menyampaikan dan mensosialisasikan capaian, program, perencanaan hingga pelaksanaan masing-masing satuan organisasi perangkat daerah yang ada di Jawa Tengah.

Kepala Biro Humas saat itu yakni Informan V juga telah berupaya memertahankan eksistensi Humas di Jawa Tengah melalui hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

sebenarnya terdapat political bargin, seperti posisi tawar dalam politik, sebenarnya Humas yang pada waktu sudah berupaya agar Humas eksis. Humas harus ada, tetapi tidak harus terstruktur, tetapi yang harus ada adalah fungsinya, jadi upayanya adalah menyerahkan kepada pansus yang menyebutkan bahwa humas harus ada. tetapi dalam perjalanan proses politik ternyata terjadi pergeseran, secara nurani saya mengatakan saya tidak kecewa, struktur dihapus itu tidak apa-apa asalkan masih ada fungsi

Adanya proses politik dan kutipan percakapan Informan II dengan Informan I yang memutuskan bahwa Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dihapus dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jawa Tengah. Proses politik ini juga dijelaskan oleh Informan II dalam wawancara sebagai berikut :

catatan pada rapat pansus terakhir adalah biro humas akan dikonsultasikan oleh para asisten sekda, akhirnya hasil konsultasi dengan gubernur biro humas memang dihilangkan, dilebur dengan diskominfo dan biro umum

Dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang Gubernur terkait eksistensi Humas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang menjadi

kunci dihapuskannya Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, subjektifitas seorang kepala daerah mau tidak mau harus dihormati hal itu juga dikemukakan oleh Inforam V saat wawancara :

Terdapat kewenangan subjektif namun hal ini tergantung kompetensi, kualifikasi, utility dalam mengambil keputusan untuk menjalankan fungsi humas. Kepala daerah yang berwenang sebagai fungsi eksistensi humas di Jawa Tengah, dan pentingnya humas di Jawa Tengah, dan keputusan tersebut harus dihargai dan dihormati.

3) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

Pada 6 September 2016, muncul berita pada berita.suaramerdeka.com dengan judul Biro Humas Pemprov Jateng Dihilangkan yang mana menjelaskan di dalamnya bahwa Informan III selaku Ketua Pansus Penyusunan SOPD menjelaskan :

hasil final pembahasan Raperda SOPD dari 59 instansi dirampingkan menjadi 48 instansi, Biro Humas dibubarkan dan digabung dengan Biro Umum, yang nanti di dalamnya ada fungsi kehumasan.

Setelah penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Bakohumas tanggal 20-21 September 2016 di Surakarta salah satu pembahasannya adalah mengenai perubahan struktur dan fungsi humas, hasil rekomendasi akademik dari kegiatan tersebut disampaikan oleh Muchamad Yuliyanto, S.Sos, M.Si selaku Staf Pengajar

Jurusan Komunikasi UNDIP yang saat itu menjadi moderator sebagai berikut :

1. Secara eksisting seharusnya lembaga kehumasan pemerintah diberi tupoksi dan struktur nomenklatur yang strategis dan memadai karena fungsi yang langsung berhubungan dengan kredibilitas kepala daerah.
2. Nomenklatur kehumasan pemerintah harus diberikan dukungan wewenang dan fasilitas memadai (struktur dan eselon) sehingga dapat menjalankan fungsi strategis Humas Pemerintah di era informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki reputasi, nama baik, persepsi positif, branding dan pada akhirnya dukungan dan situasi kondusif dalam berhubungan dengan masyarakat.
3. Penempatan lembaga Humas Pemerintah yang lemah dan tidak memadai pada struktur nomenklatur kelembagaan (SOTK) pemerintah akan berdampak langsung tupoksi yang mengover relasi antara pemerintah (daerah) dengan berbagai komponen (stakeholders). Sehingga dapat berdampak tidak menguntungkan bagi eksistensi kepala daerah termasuk lembaga pemerintahan yang dipimpinnya, dan otomatis akan menimbulkan relasi yang tidak kondusif karena rendahnya apresiasi, persepsi negative bahkan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.

3.2.3 Fungsi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pasca Penataan SOPD Terbagi Pada Dua Instansi

Perolehan data terkait tinjauan fungsi humas di masa setelah penataan satuan organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

1) Fungsi Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Setelah pengesahan Peraturan Daerah mengenai Satuan Organisasi Perangkat Daerah, salah satu fungsi humas berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Informan I yakni Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut :

Fungsi Humas pada Diskominfo lebih besar dan harus meng-cover penyebaran informasi mengenai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Fungsi Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika harus bisa menampilkan Jawa Tengah itu apa. Seperti memberikan penjelasan, memberitahukan informasi terkait capaian, program, perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut juga disampaikan oleh Informan II selaku Ketua Pansus Penyusunan Perda berikut ini :

kebutuhan komunikasi publik yang besar dan kebutuhan milenial ditangani kominfo, humas/public relation dalam konteks besar ada pada kominfo, misalnya persoalan konten, media yang secara teknis misalnya kunjungan, menurut saya kominfo melekat, serta sebagai juru bicara adalah fungsi humas kominfo

Fungsi humas yang terkait pada kebutuhan komunikasi publik dua arah yang responsif bahkan juru bicara hingga menampilkan *corporate*

image Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat merupakan bagian dari fungsi dan tugas utama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Bahkan Informan III juga mendukung penjelasan sebelumnya :

kemudian terkait dengan aktifitas-aktifitas SKPD kepada masyarakat diampu oleh dinas komunikasi dan informatika

Pembentukan *corporate image* yang harus dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika salah satunya dengan menginformasikan aktifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada masyarakat supaya upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dari berbagai bidang diketahui. Penjelasan lebih mendetail oleh Informan VII selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berikut ini :

fungsi humas di kominfo sesuai dengan peraturan yang ada yakni sebagai public relation, PR nya pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara umum, secara keseluruhan juga kerana sebagai public relation di dalamnya ada fungsi publikasi, fungsi kehumasan yang ada di Dinas Kominfo, Dinas Kominfo harus mampu mendukung seluruh kegiatan informasi publik yang ada di 48 SKPD Provinsi Jawa Tengah

Komando Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menginformasikan seluruh kegiatan yang ada pada 48 SKPD di Jawa Tengah kepada masyarakat supaya dapat membentuk *corporate image* Pemerintah Daerah yang maksimal. Secara teknis pengelolaan humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika berikut :

pengelolaanya yang ada di Diskominfo dari aspek kelembagaan yakni bidang informasi dan komunikasi publik dibagi dalam 3 seksi, pengelolaannya 3 seksi itu ada seksi yang menerima informasi dari masyarakat dan melakukan analisis, yang kedua seksi yang mengelola terkait dengan aduan masyarakat yang juga nanti akan dianalisis selanjutnya akan disusun dalam satu naskah yang akan dipublikasikan dan atau menjawab dari semua keluhan dari masyarakat yang ketiga ada seksi yang memang menangani terkait dengan publikasi verbal melalui berbagai saluran terkait dengan kearifan lokal, bisa melalui pertunjukan rakyat, atau seni tradisional

Pengelolaan fungsi humas dalam bidang informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dari menerima informasi dari masyarakat hingga publikasi verbal melalui seni tradisional tersedia dan terlaksana pada dinas ini untuk membentuk *corporate image* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa bidang tersebut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

2) Humas pada Bagian Humas dan Protokol Setda

Fungsi Humas sebagai *personal branding* pemimpin daerah di Jawa Tengah dilaksanakan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah yang menempel pada Biro Umum. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan I yakni Gubernur Jawa Tengah berikut :

humas harus bisa mengcover dan menyampaikan kebijakan-kebijakan gubernur yang sifatnya mungkin jauh lebih spesifik, seperti gubernur berkunjung, gubernur melihat, gubernur ngecek, gubernur sidak dan berbagai macam lainnya

Personal branding kepala daerah dibentuk oleh humas dengan mengcover segala informasi, dan kebijakan yang spesifik. Bahkan Informan II selaku Ketua Pansus Perda SOPD Jawa Tengah berikut ini :

protokoler merupakan urusan biro umum, yang serba remeh misalnya mengatur jadwal gubernur, dilakukan oleh biro umum

Selain membentuk *personal branding*, fungsi lain bagian humas dan protokol adalah sebagai protokoler seperti mengatur jadwal kepala daerah. Informan III selaku pejabat yang turut serta melakukan penertiban kelembagaan di Jawa Tengah menambahkan :

peran kehumasan yang terkait dengan apapun yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur itu diperankan di biro umum

Melayani dan mendampingi kepala daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah merupakan tugas dari bagian humas dan protokol. Selanjutnya Informan VI selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol menjelaskan lebih teknis mengenai fungsi humas pada bagiannya sebagai berikut :

subbag peliputan dan dokumentasi, yang membawahi peliputan dan PPID, kemudian sub bagian publikasi dan hubungan media yang membawahi olah online, kemudian media buying, yang terkahir subbag protocol, humas untuk menjadi lembaga PR yang komprehensif, mulai dari peliputan, kemudian pendokumentasian, kemudian ada juga fungsi pengelolaan informasi, kemudian hingga fungsi publikasi, dan fungsi hubungan media, sampai dengan analisis media

Brand image kepala daerah dibentuk dengan melakukan peliputan, dokumentasi, publikasi, protokoler, bahkan hubungan media terkait sepak terjang kepala daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Humas Sebagai Suatu Revitalisasi Atau Reduksi

Temuan data terkait eksistensi humas di Jawa Tengah setelah penataan SOPD, sebagian informan ada yang menyatakan sebuah reduksi ada juga yang revitalisasi. Informan III sebagai pejabat yang bertugas menertibkan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa :

saya itu melihatnya memang terlalu kecil, dengan sumberdaya yang begitu kecil harus melayani pimpinan yang aktivitasnya luar biasa, akhirnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan maksimal

Humas Jawa Tengah mengalami reduksi karena dianggap strukturnya terlalu kecil dengan sumber daya yang kecil memiliki tugas sebagai pelayan pimpinan dengan aktivitas tinggi sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal. Pendapat Informan III tersebut sejalan dengan Informan V yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas :

Terjadi inefisiensi setingkat kasubag, mungkin tantangannya untuk mengubah fungsi sebagai juru bicaranya gubernur seperti klarifikasi

Menurutnya akibat adanya reduksi maka terjadi inefisiensi struktur humas yang dianggap belum bisa ideal sebagai *public relations* seperti menjadi juru bicara kepala daerah dengan memberikan klarifikasi dan menghadapi media. Berbeda pendapat dengan Informan VI yang

merupakan pejabat bagian humas dan protokol menjelaskan sebagai berikut :

Kalau menurut saya revitalisasi karena ada pembagian peran yang bagus sebagai sebuah sinergi, kalau dilaksanakan satu lembaga saja saya kira tidak optimal dan praktek-praktek di Jawa Tengah ini, mirip dengan praktek di Pemerintah Pusat

Pembagian peran humas antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bagian Humas dan Protokol melalui sinergi untuk mengoptimalkan fungsi humas yang ideal dari segi *corporate branding* pemerintah daerah dan *personal branding* kepala daerah. Informan VII sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga setuju dengan pendapat Informan VI berikut ini :

pemisahan ini lebih kepada refitasilasi, memperbaiki fungsi, memfokuskan fungsi masing-masing, sehingga yang kemarin mungkin belum tertangani secara keseluruhan ada pada SKPD, tidak mengkoordinasikan seluruh SKPD karena fungsi biro sekarang sudah ada dituntut sesuai dengan pearturan fungsi komunikasi publik yang bersifat narasi tunggal tentang pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kominfo

Pemisahan fungsi humas yang telah dilakukan merupakan sebuah revitalisasi untuk memperbaiki fungsi humas dan memperjelas fungsi humas masing-masing bagian dan bidang yang berada pada sekretariat daerah dan dinas komunikasi dan informatika. Intinya adalah masing-masing fungsi saling melengkapi. Akan tetapi masing-masing fungsi humas juga dihadapkan pada beberapa tantangan sebagai berikut :

tantanganya harus mengupdate dan mengupgrade, harus gaul, membaca, membedakan, punya ilmu, dan kompeten

Dalam mengoptimalkan fungsi humas tersebut Informan I selaku kepala daerah menegaskan tantangan yang harus dihadapi oleh pengampu fungsi humas yakni harus *update, upgrade, gaul* dalam menyampaikan, menyebarkan dan membentuk *personal branding* kepala daerah dan *corporate branding* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu tantangan yang harus dihadapi masing-masing organisasi kehumasan Jawa Tengah adalah :

sumber informasi daerah berasal dari gubernur sehingga terkadang kesulitan dalam membagi tugas

Tidak bisa dipungkiri bahwa aktor utama sumber informasi pada pemerintah daerah adalah kepala daerah, kemungkinan untuk mebagi tugas akan terjadi kesulitan, maka Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Komunikasi dan Informatika harus saling bersinergi, berkoordinasi, dan mendukung untuk mencapai fungsi humas yang optimal seperti pendapat Informan III di atas sebagai pejabat pengatur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapat tersebut sejalan dengan ungkapan Informan VII yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berikut ini :

Tantangannya adalah bagaimana mensinergikan fungsi kehumasan supaya tidak terjadi duplikasi, maka kolaborasi dan setiap pelaksanaan tugas komunikasi dalam menentukan pilihan tema itu menjadi hal yang utama

Sinergi dan kolaborasi menjadi tugas rumah utama bagi masing-masing organisasi kehumasan yang ada di Jawa Tengah ini. Disamping

itu terdapat juga pendapat Informan VI sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol sebagai berikut :

satu, saling menumpuk dan berebut tugas kehumasan, kedua saling lempar tugas, ketiga konsekuensinya adalah bersinergi. Humas ini personal branding, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, pimpinan, Ganjar sebagai personal. Lebih banyak berbasis laporan kegiatan dan peristiwa, ceremony, statement, dan pelontaran isu. Di Kominfo itu diharapkan dapat mengbackup dari sisi pendalaman materi.

Tantangan lainnya adalah tumpang-tindih, dan lempar-lemparan pekerjaan, kedua tatangan ini dapat diminimalisir dengan adanya sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bagian Humas dan Protokol supaya kedua fungsi humas berjalan sempurna dan saling melengkapi sesuai amanah Peraturan Daerah mengenai Penataan SOPD yang telah disahkan.

Posisi Humas pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah saat ini berada pada *low level*, karena dihapuskannya organisasi Humas Jawa Tengah mengakibatkan masing-masing SOPD memiliki Jabatan Pranata Humas yang dijabat oleh staf golongan III. Gubernur juga berpesan, pejabat fungsional yang dilantik harus familiar terhadap teknologi informasi. Karena keberadaan teknologi informasi saat ini sangat membantu pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Kepada para pranata humas, dia berpesan agar proaktif untuk memahami harapan publik. Hal itu dapat diketahui dengan rutin membuat polling di media sosial. (Jatengprov, 2018)

Kenyataan kondisi Humas Pemerintah di Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa Humas dianggap sebagai tugas dan fungsi yang kurang strategis sehingga masih menjalankan fungsi teknis mewujudkan pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat yang ditanggung oleh Pranata Humas sebagai pelaksana tugas, belum dianggap sebagai fungsi manajerial. Padahal Humas seyogyanya harus bekerja lintas unit kerja karena harus menyokong nama baik pemerintah daerah.